DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah,* Ctk. Ketiga, Ascaraya, Yogyakarta, 2007.

Akhmad Farroh Khasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan praktik),* Ctk. Pertama, UIN-Maliki Press, Malang, 2018, *e-book*.

Buyung Sarita, *Manajemen Perbankan*, Ctk. Pertama, Unhalu Press, Kendari, 2011, *e-book*.

Djoni Sumardi Gozali, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan*, Ctk. Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2022.

Fauziah, et. al. *Ekonomi Syariah,* Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, *e-book*.

Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, *e-book*.

I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, Ctk. Pertama, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2013, *e-book*.

M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1979.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, *e-book*.

P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, *e-book*.

Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah,* Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2021, *e-book*.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Putra A Bardin, Bandung, 1977, *e-book*.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Rika Saraswati, "*Buku Ajar Hukum Benda*", Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2024, *e-book*.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Delapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, *e-book*.

Sri Mulyani Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003, *e-book*.

Susanti Adi Nugroho, *Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2002,* Refleksi, Jakarta 2002, *e-book*.

Syaiful Anwar, *Kebanksetralan*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, *e-book*.

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah,* Ctk. Pertama, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, *e-book*.

B. JURNAL

A. Qirom Syamsudin Meliala, "Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya", *Liberty*, Yogyakarta, 1985.

Agus Marzuki dan Arvie Johan. "Universalitas Asas Privity of Contract"*, Jurnal TAPIs*, No. 10, Vol. 2.

Alifatun Istiqamah Lailani, *et. al*, "Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia: Peran, Instrumen, Dan Tinjauan Kebijakan", *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 5, 2025.

Anggita Triadana, "Pengaturan dan Penerapan Doktrin Unjust Enrichment Menurut Hukum Indonesia, Belanda, Peranci, dan Jerman", *Yustisia Tirtayasa*, Vol. 5, No. 3, 2025.

Andina Dwijayanti, et al., "Manfaat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Nasabah di Bank Jabar Banten (BJB)", *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2022.

Arbaina Mayasari, et al., "Penerimaan dan Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah", Makalah disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST), Yogyakarta, 23 november 2024.

Ariani Sitanggang, et al., Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 16 No. 1 Tahun 2025, Universitas Negeri Semarang.

Azriel Ghiffari Ramadhan Saleh, Tesis, 2025, Universitas Islam Indonesia.

Destianingsi, et al., Jurnal Edunomika Vol. 7 No. 02 Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Deva Vira Ariani, et al., Jurnal Media Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 Tahun 2025, Universitas Mulawarman.

Fajar Hanis Firdaus, Skripsi, Tahun 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ghani Maeda Yuhandri, "Urgensi Penerapan Doktrin Unjust Enrichment di Indonesia: Studi Banding dengan Jerman dan Singapura", *Lex Patrimonium*, Vol .4, No. 1, 2025.

Gladwin Wijaya dan Urbanisasi, "Rekontruksi Konsep Kekayaan dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto di Indonesia", *Jurnal Multilingual*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Jeanette Agire Medahalyusa, Achmad Busro, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan*, Jurnal Notarius, Vol. 16. No. 2. 2023.

Lulu Agustiani, et. al. "Peran Hukum Perikatan dalam Mendukung Perkembangan Hukum di Indonesia : Peluang dan Hambatan". *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No.2, 2024.

Made Irma Lestari, "Kesediaan *Micro Merchants* Membayar *Merchant Discount Rate* dan Biaya *Settlement* Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah", InFestasi, Vol. 19, STIE Wiyatamandala, 2023.

Mochammad Milladi Andhika, *et. al*, "Tantangan Perkembangan Teknologi Melalui Metode Pembayaran QRIS Bagi UMKM dan Konsumen", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 9, No. 1, 2025.

Muhammad Farhan Bagja Naufal, et. al. "Studi Perbandingan Hak Milik menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam"*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.1, 2022.

Muhammad Rapli, *et. al*, "Transformasi Doktrin Unjust Enrichment dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia", *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3, 2025.

Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata", *Jurnal Tahkim,* Vol. 12, No. 2, 2021.

Muklis, "Esensi Hak Keperdataan Yang Terkandung Dalam Hak Atas Tana"*, Juris Studia Jurnal Kajian Hukum"*, Vol. 4, No, 3, 2024.

Muthia Azzahra, "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi", Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No.4. 2024.

Nugrah Leksono Putri Handayani, *et. al*, "Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM", *Jurnal Mahasiswa*, Vo. 4, No. 3, 2022.

Nur Aliza Zuhrifah, Skripsi, Tahun 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rika Saraswati, "*Buku Ajar Hukum Benda*", Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2024, *e-book*.

Riska Syovina, *et. al*, "Sistem Pembayaran Di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 6, 2024.

Salma Rositasari, "Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu dan Digital di Indonesia", *Jurnal Ekonomi : Journal of Economic*, Vol. 13, No. 2, 2022.

Syarif Zakarian Said Wachdin, *et al.*, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat dalam Rekonseptualisasi *Judicial Pardon*", *Proceeding of Airlangga Faculty Law Colloquium*.

Umi Rachmah Damayanti, et al., "Literasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Pekanbaru", *BATIK: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, Vol. 1, Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI), 2023.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Dutch Civil Code.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran.

D. DATA ELEKTRONIK

Alat Pembayaran Non-Tunai: Pengertian, Jenis, hingga Manfaatnya, terdapat dalam https://developers.bri.co.id/id/news/alat-pembayaran-non-tunai-pengertian-jenis-hingga-manfaatnya#:~:text=Alat%20pembayaran%20non%2Dtunai%20adalah%20instrumen%20pembayaran%20yang,teruji%20*%20Mendapat%20banyak%20promo%20dan%20diskon, diakses tanggal 27 April 2026.

Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dan Unsur Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat dalam https://bag-hukum.probolinggokota.go.id/detail/gugatan-perbuatan-melanggar-hukum-dan-unsur-pasal-1365-kuh-perdata, diakses pada 28 Mei 2026.

Irwansyah D. Mahendra, *Unjust Enrichment: Keserupaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, terdapat dalam https://blog.lekslawyer.com/unjust-enrichment-dalam-kuh-perdata-indonesia/, diakses tanggal 16 Mei 2025.

Kemendag: Pengusaha Jangan Bebankan Biaya Tambahan QRIS hingga CC pada Konsumen, terdapat dalam https://news.espos.id/kemendag-pengusaha-jangan-bebankan-biaya-tambahan-qris-hingga-cc-pada-konsumen-1740966, diakses pada tanggal 15 April 2026.

MDR QRIS BAGI MERCHANT: KATEGORISASI DAN SIMULASI, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx, diakses tanggal 9 Januari 2026.

MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) QRIS: MEMAHAMI BIAYA DALAM TRANSAKSI DIGITAL, terdapat dalam https://pakaidonk.id/berita/info-lengkap-tentang-merchant-discount-rate/ , diakses tanggal 26 Juli 2026.

QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS), terdapat dalam https://snki.go.id/quick-response-code-indonesian-standard-qris/, diakses tanggal 26 April 2026.

QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS), terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx, diakses tanggal 6 Maret 2026.

Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx, diakses tanggal 6 Januari 2026.

Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terdapat dalam https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-GugatanPerbuatan-MelawanHukum.html, diakses pada 28 Mei 2026.

Tumbuh 162%, QRIS Jadi Tulang Punggung Transaksi Digital Juli 2025, terdapat dalam https://qris.interactive.co.id/homepage/blog-detail.php?lang=en&page=MjE5, diakses pada 30 April 2026.

Unjust Enrichment: Keserupaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, terdapat dalam

https://hukumproperti.com/unjust-enrichment-dalam-kuh-perdata-indonesia/#praktik, diakses pada tanggal 22 Mei 2026.

Warganet Keluhkan Bayar QRIS Kena Biaya Tambahan Rp1.000, Begini Kata YLKI, terdapat dalam https://www.tempo.co/ekonomi/warganet-keluhkan-bayar-qris-kena-biaya-tambahan-rp-1-000-begini-kata-ylki-168610 , diakses pada 26 Juli 2026.

Win-Win Solution QRIS CROSS-BORDER, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/win-win-solution-qris-cross-border.aspx, diakses pada 30 April 2026.